

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

1. Potensi Wilayah Pesisir di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara maritim yang ada didunia. Lebih dari delapan puluh persen dari total luas wilayah Indonesia merupakan wilayah perairan. Indonesia menyandang predikat sebagai negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman beserta Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Pusat Hidrologi dan Oseanografi (Pushidros) TNI Angkatan Laut pada tahun 2018, panjang garis pantai Indonesia mencapai 108.000 km.

Menyadari potensi yang sangat besar ini, pemerintah melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendukung pengembangan kawasan pesisir dengan mengusung konsep kota tepi air atau *waterfront city* sebagai salah satu upaya mengembangkan kota cerdas berkelanjutan.

Konsep *Waterfront City* sudah banyak digunakan di Indonesia. Konsep ini diharapkan menjadi media yang cocok untuk mengelola wilayah tepian air (baik laut, sungai, ataupun danau dan lainnya) agar menjadi lebih baik dan maksimal sehingga wilayah tersebut dapat dimanfaatkan dalam berbagai hal, seperti sebagai kawasan wisata ataupun lainnya.

Secara umum, *Waterfront City* atau kota tepi air adalah suatu kawasan atau wilayah yang berbatasan langsung dengan badan air dan memiliki kontak langsung. Adapun badan air yang dimaksud yaitu bisa berupa laut, sungai, danau, atau yang lainnya.

2. Potensi Wilayah Pesisir Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat memiliki garis pantai yang panjang. Total terdapat kurang lebih 827 kilometer garis pantai yang dimiliki dan terbagi

menjadi dua, yaitu pesisir utara dan pesisir selatan. Setiap wilayah di Jawa Barat memiliki panjang garis pantai yang berbeda berdasarkan pada batas administrasi masing-masing.

Tabel 1.1

Panjang Garis Pantai di Jawa Barat Berdasarkan Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota	Panjang Garis Pantai (km)	Letak
1	Kabupaten Bekasi	72 km	Pesisir Utara
2	Kabupaten Karawang	84 km	Pesisir Utara
3	Kabupaten Subang	48 km	Pesisir Utara
4	Kabupaten Indramayu	147 km	Pesisir Utara
5	Kabupaten Cirebon	54 km	Pesisir Utara
6	Kota Cirebon	7.2 km	Pesisir Utara
7	Kabupaten Sukabumi	117 km	Pesisir Selatan
8	Kabupaten Cianjur	72.61 km	Pesisir Selatan
9	Kabupaten Garut	80 km	Pesisir Selatan
10	Kabupaten Tasikmalaya	54.5 km	Pesisir Selatan
11	Kabupaten Pangandaran	91 km	Pesisir Selatan

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

3. Potensi Wilayah Pesisir Kabupaten Indramayu

Kabupaten Indramayu merupakan sebuah wilayah yang terletak di bagian Utara Pulau Jawa atau biasa dikenal dengan istilah Pantura dan secara administratif termasuk ke dalam Provinsi Jawa Barat. Kondisi geografis ini mengakibatkan topografi Kabupaten Indramayu landai dengan tingkat kemiringan 0-2% (BPS, 2020).

Secara administratif, Kabupaten Indramayu memiliki 31 kecamatan dengan 8 kelurahan dan 309 desa. Dengan letak yang membentang sepanjang Pesisir Utara Pulau Jawa, hal ini menjadikan Kabupaten Indramayu memiliki garis pantai sepanjang 147 km yang melalui 11 kecamatan dengan 36 desa, yaitu Kecamatan Krangkeng, Karangampel, Juntinyuat, Balongan, Indramayu, Cantigi, Pasekan, Losarang, Kandanghaur, Sukra, dan Patrol.

Modal utama dalam pembentukan atau perencanaan suatu kota tepi air adalah daerah yang berbatasan dengan badan air. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain yang ada di Jawa Barat, maka Kabupaten Indramayu merupakan daerah yang memiliki garis pantai terpanjang. Dengan panjang garis pantai Kabupaten Indramayu yang mencapai 147 km, tentu Kabupaten Indramayu memiliki potensi yang sangat besar untuk mengimplementasikan konsep kota tepi air.

4. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Indramayu

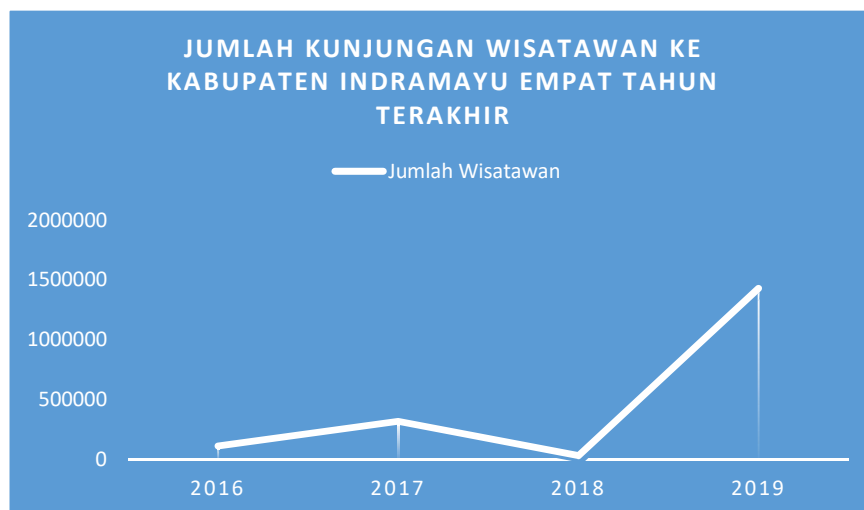
Berdasarkan dokumen penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Indramayu tahun 2011-2031, Kabupaten Indramayu memiliki sembilan peruntukan kawasan budidaya, yaitu kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara. Salah satu peruntukan kawasan budidaya, kawasan peruntukan hutan rakyat, terdapat pada seluruh kecamatan di Kabupaten Indramayu dengan total luas sebesar 38.156 ha.

Tidak hanya lahan yang memang diperuntukkan khusus untuk hutan rakyat, masyarakat dapat menggunakan lahan di seluruh sempadan pantai, sungai, ataupun waduk dan situ. Total, terdapat lahan seluas kurang lebih 1.470 ha di sempadan pantai yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi hutan rakyat. Jika ditelisik lebih dalam, maka wilayah sempadan tersebut merupakan modal besar yang dapat dimanfaatkan untuk membangun suatu kawasan tepi air. Hal ini juga membuktikan bahwa belum adanya peruntukan lahan sempadan perairan dengan baik sehingga pemerintah menjadikan wilayah tersebut sebagai salah satu bagian wilayah yang dapat dimanfaatkan sebagai hutan rakyat.

5. Kondisi Pariwisata Kabupaten Indramayu

Sektor pariwisata merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan ekonomi nasional maupun daerah (Kementerian Pariwisata, 2016). Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka perlu dilakukan suatu upaya dalam mendukung suatu wilayah untuk memiliki kawasan wisata yang menarik, serta mampu bersaing dengan wilayah lain untuk menarik pengunjung.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat, jumlah kunjungan wisatawan ke destinasi wisata yang ada di Kabupaten Indramayu pada tahun 2019 berjumlah 1.430.072 orang, meningkat tajam dari tahun sebelumnya yaitu hanya 31.632 orang. Hal ini menandakan bahwa potensi wisata di Kabupaten Indramayu cukup tinggi, sehingga diperlukan penataan kawasan wisata dengan baik terutama wisata pantai salah satunya yaitu dengan mengadopsi konsep *Recreational Waterfront* untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki.



Gambar 1.1

Data kunjungan wisatawan ke Kabupaten Indramayu empat tahun terakhir

(Sumber : BPS Jabar)

6. Risiko Ancaman Bencana di Kabupaten Indramayu

Dalam membangun atau merencanakan suatu wilayah tepi air atau *waterfront*, kemungkinan terjadinya bencana yang dapat mengancam keberadaan kawasan juga harus dipertimbangkan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Inarisk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kabupaten Indramayu memiliki delapan ancaman bencana, yaitu 1) Banjir 2) Banjir Bandang 3) Cuaca Ekstrem 4) Gelombang Ekstrem dan Abrasi 5) Gempa bumi 6) Kebakaran Hutan dan Lahan 7) Kekeringan, dan 8) Tanah Longsor. Dalam kaitannya dengan pengembangan atau perencanaan kawasan tepi air laut, maka ancaman bencana yang patut dipertimbangkan adalah bencana Tsunami. Pesisir Kabupaten Indramayu tidak memiliki ancaman bencana Tsunami.

7. Konsentrasi dan Proyeksi Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Indramayu

Konsentrasi penduduk dan pertumbuhan penduduk kabupaten Indramayu terletak di kecamatan yang berada di wilayah utara kabupaten Indramayu di mana wilayah tersebut merupakan wilayah pesisir dan pantai, seperti Kecamatan Indramayu dan Kecamatan Karangampel (BPS, 2020). Dengan jumlah penduduk sebanyak 1.861.269 jiwa dan proyeksi pertumbuhan penduduk sebesar 0.54%, maka dibutuhkanlah penataan, penyediaan, dan maksimalisasi kawasan untuk menampung jumlah penduduk yang semakin banyak ke depannya.

Belum tertatanya wilayah Pesisir Kabupaten Indramayu secara umum dengan baik juga menjadi salah satu alasan untuk melakukan penelitian tentang hal ini, sehingga dengan realitas yang ada, masalah ini sangat mungkin diangkat dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan judul **Kaji Potensi Pengembangan *Recreational Waterfront* di Kawasan Pesisir Kabupaten Indramayu.**

B. Rumusan Masalah Penelitian

Pengembangan wilayah pesisir di Kabupaten Indramayu harus dimulai sedini mungkin. Hal ini dikarenakan Kabupaten Indramayu memiliki potensi dan modal yang besar. Dengan panjang garis pantai 147km, maka pengadopsian konsep kota tepi air akan sangat sesuai. Dengan fakta yang ada berdasarkan dokumen penjabaran RTRW Kabupaten Indramayu, pemerintah belum mampu untuk mengoptimalkan, mengembangkan, serta tidak jeli terhadap potensi wilayah pesisir Kabupaten Indramayu.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Potensi Pengembangan *Recreational Waterfront* di Kawasan Pesisir Kabupaten Indramayu?”.

Agar penelitian lebih terarah, maka peneliti mencoba membuat pertanyaan penelitian yang bersifat khusus dan merupakan penjabaran dari rumusan masalah tersebut, yaitu:

1. Bagaimana kondisi eksisting fisik dan sosial kawasan Pesisir Kabupaten Indramayu?
2. Bagaimana kesesuaian kawasan Pesisir Kabupaten Indramayu untuk *Recreational Waterfront*?
3. Bagaimana persebaran potensi pengembangan *Recreational Waterfront* di Kawasan Pesisir Kabupaten Indramayu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi kondisi eksisting fisik dan sosial kawasan Pesisir Kabupaten Indramayu
2. Menganalisis kesesuaian kawasan Pesisir Kabupaten Indramayu untuk *Recreational Waterfront*
3. Memetakan persebaran potensi pengembangan *Recreational Waterfront* di Kawasan Pesisir Kabupaten Indramayu

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai bahan masukan dalam pengembangan ilmu geografi yang terkait dengan pengelolaan kawasan pesisir
 - b. Sebagai sumber data bagi peneliti selanjutnya yang terkait dengan pengembangan *waterfront city* di wilayah yang lain
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Indramayu dalam mengembangkan kota tepi air di wilayah Pesisir Kabupaten Indramayu, khususnya *Recreational Waterfront*.
 - b. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat setempat dalam mempersiapkan pengembangan *waterfront city* di Kabupaten Indramayu, khususnya *Recreational Waterfront*.

E. Struktur Organisasi Skripsi

Penelitian ini diuraikan dalam lima bab. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah UPI Tahun 2019, yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pendahuluan berisi Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian secara teoritis dan praktis, Struktur Organisasi Skripsi, serta Definisi Operasional.

BAB II Kajian Pustaka

Kajian pustaka berisi teori yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas pada penelitian, sehingga akan membantu peneliti dalam menjawab permasalahan yang diajukan. Teori yang terdapat dalam kajian pustaka penelitian ini meliputi Konsep *Waterfront City*, Syarat dan Prinsip

Perancangan *Waterfront City*, Jenis-jenis *Waterfront City*, Konsep *Recreational Waterfront*, Konsep Pesisir, Kondisi dan Karakteristik Masyarakat Pesisir, dan Kendala dalam Pengembangan Kawasan Pesisir dan Wilayah Tepi Air.

BAB III Metode Penelitian

Metode penelitian berisi mengenai teknik yang digunakan dalam kita melakukan penelitian. Bab ini terdiri dari Lokasi Penelitian, Desain Penelitian, Pendekatan Geografi, Alat dan Bahan, Variabel Penelitian, Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Kerangka Berfikir.

BAB IV Temuan dan Pembahasan

Bab ini berisi jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan, yaitu kondisi eksisting wilayah Pesisir Kabupaten Indramayu, kesesuaian wilayah pesisir Kabupaten Indramayu berkaitan dengan konsep *Recreational Waterfront*, dan persebaran potensi pengembangan *Waterfront Recreational Area* di Kawasan Pesisir Kabupaten Indramayu

BAB V Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi

Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi menjelaskan secara ringkas hal yang telah ditemukan dan dibahas, serta rekomendasi peneliti setelah selesai melakukan penelitian.

F. Definisi Operasional

1. Kondisi Eksisting

Kondisi eksisting merupakan kondisi saat ini (Lanin, 2018). Lebih jelasnya yaitu kondisi asli yang ada di wilayah pesisir kabupaten Indramayu. Kondisi yang dimaksud meliputi kondisi fisik dan kondisi sosial budaya. Merujuk pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Republik Indonesia, kondisi fisik terdiri dari keadaan geologi, bentuk muka bumi atau fisiografis, serta iklim. Sedangkan kondisi sosial budaya memiliki lima indikator, yaitu pengadaan upacara

adat, kegiatan keagamaan, pekerjaan masyarakat, dan aktivitas penduduk pada tepi air (Sastrawati, 2003).

2. Kesesuaian wilayah pesisir dengan konsep *Recreational Waterfront*

Kesesuaian wilayah pesisir dengan konsep *Recreational Waterfront* merupakan keadaan sejauh mana wilayah pesisir Kabupaten Indramayu memiliki kesesuaian jika dibandingkan dengan syarat *Recreational Waterfront*, yaitu meliputi keadaan alam dan lingkungan, keindahan lanskap wilayah kajian, aksesibilitas dan sarana prasarana, penataan bangunan dan lanskap, pengelolaan, aturan, ekonomi, kondisi sosial dan budaya, serta pemanfaatan fisik pantai dan badan air untuk keperluan rekreasi.

3. Persebaran potensi pengembangan *Recreational Waterfront* di Kawasan Pesisir Kabupaten Indramayu

Persebaran potensi pengembangan *Recreational Waterfront Area* di Kawasan Pesisir Kabupaten Indramayu merupakan gambaran persebaran berdasarkan tingkatan yang dihasilkan dari pengolahan data penelitian yang akan dibagi menjadi lima, yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah.

G. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Kajian Pengembangan Konsep Waterfront City di Kawasan Pesisir Kota Ambon
1	Peneliti	Rivai Notanubun, Mussadun.

Latar Belakang	<p>Kondisi yang dinamis Kota Ambon sebagai Ibu kota Provinsi dan pusat kegiatan nasional (PKN) di Timur Indonesia yang di dukung dengan sektor utama kota sebagai pusat jasa dan perdagangan tentunya berpengaruh besar terhadap laju pertumbuhan pembangunan dan kepadatan penduduk yang memiliki kecenderungan didominasi faktor urbanisasi penduduk dan perubahan lingkungan. maka untuk mendukung dan mengatur kondisi tersebut, dalam penataan ruang wilayah kota ambon bertujuan untuk (a) mewujudkan ruang wilayah kota sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; (b) mewujudkan kota Ambon sebagai kota jasa di kawasan timur Indonesia; (c) mewujudkan Kota Ambon sebagai waterfront city dan eco city untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (RTRW Kota Ambon, 2011-2031). Dengan pola pertumbuhan penduduk yang memadati daerah pesisir, maka kawasan tersebut menyimpan masalah yang kompleks, karena masyarakat akan bersentuhan langsung dengan ekosistem pantai dan lautnya. Sehingga jika tidak dibuat suatu perencanaan yang terstruktur maka kawasan tersebut akan tumbuh secara tidak terjendali. Sedangkan secara bersamaan ruang pesisir tersebut akan menjadi identitas khusus yang menjadi tanda pengenal suatu kota dalam wacana global. Isu inilah yang kemudian menjadi titik tolak yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Ambon dalam membuat perencanaan Ambon Waterfront City yang tertuang dalam Masterplan Perencanaan Ambon Waterfront City pada tahun 2009.</p>
Metode	<p>Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memahami pengembangan konsep Waterfront City berdasarkan kondisi kawasan pesisir kota ambon. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena, permasalahan bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisahkan), sehingga variabel yang diteliti mencakup situasi sosial, tempat (place), pelaku (actor) dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis, (Sugiyono, 2015).</p>

	Hasil	Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis kondisi eksiting Kecamatan Sirimau dari aspek fisik lingkungan, ekonomi dan sosial budaya, dapat disimpulkan bahwa Kota Ambon belum sesuai dengan konsep waterfront city, sehinggaperlu adanya pengembangan yang sesuai potensi-potensi yang dimiliki kawasan pesisir Kecamatan Sirimau dalam rangka menunjang Konsep Waterfront City di Kawasan Pesisir Kota Ambon.
--	--------------	--

No.	Judul	
		Pembangunan Waterfront City sebagai Sarana dan Prasarana Pengembangan Ekonomi dan Pariwisata Pesisir Kota Cirebon yang Berkelanjutan
	Peneliti	Laurentia Prisca
2	Latar Belakang	<p>Kota Cirebon sebagai daerah yang kondisi geografinya berupa dataran rendah memiliki kondisi pesisir yang perlu dikembangkan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Pesisir kota Cirebon sangat dekat dengan pusat kota, namun kurang diperhatikan sehingga wilayah pesisir pun hanya menjadi lokasi perlintasan truk-truk besar pengangkut muatan dari pelabuhan Cirebon. Potensi pesisir kota Cirebon bisa ditingkatkan dengan membangun waterfront city. Pembangunan waterfront city, merupakan perencanaan yang dapat mencakup beberapa aspek dalam pengelolaan wilayah pesisir. Waterfront city dapat dibangun di atas tanah reklamasi dan pembangunan di atasnya dapat mencakup permukiman, pariwisata, serta sentra-sentra ekonomi seperti minapolitan.</p> <p>Berdasarkan rencana tata ruang kota, wilayah pesisir akan dikembangkan untuk perluasan pelabuhan Cirebon, sehingga kota Cirebon khususnya wilayah pesisir akan membutuhkan sarana dan prasarana penunjang pelabuhan. Salah satu fungsi pembangunan waterfront city adalah mampu menunjang wilayah pelabuhan dan agar menjaga kondisi pesisir tetap baik. Selain itu, potensi perikanan dan kelautan sangatlah besar berupa tambak-tambak dan pengolahan hasil laut berupa terasi, krupuk ikan, ikan asin, dan lain-lain. Pembangunan waterfront akan memudahkan nelayan dan petambak menjual hasil lautnya karena pembangunan waterfront city juga akan meningkatkan pariwisata kota Cirebon.</p>

	Metode	<p>1. Pendekatan Teoritis Pendekatan teoritis dilakukan guna memperoleh data yang berupa jurnal, undang–undang, laporan, buku teks dan lain sebagainya. Hal ini, bertujuan untuk mendukung penulis dalam penelitian yang berkaitan dengan studi yang dikerjakan.</p> <p>2. Pendekatan Deskriptif Pendekatan dilakukan dengan menganalisis keadaan fisik wilayah perencanaan dan daerah sekitarnya, melalui uraian dan penjelasan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif, baik dalam bentuk tulisan maupun penganalisaan.</p>
	Hasil	Berdasarkan analisis data, dan analisis terhadap lokasi perencanaan, permasalahan yang terjadi di kota Cirebon adalah wilayah administrasi yang kecil, persebaran penduduk yang belum merata, potensi-potensi sumber daya alam yang belum berkembang, kondisi pesisir pantai yang mengalami abrasi, serta keterbatasan sarana dan prasarana, yang ada di pesisir pantai utara kota Cirebon. Melihat keterbatasan yang dihadapi oleh kota Cirebon direncanakan pembangunan pesisir pantai yang berkelanjutan dengan pembangunan kawasan tepi air atau waterfront city.

No.	Judul	Prinsip Perancangan Kawasan Tepi Air (Kasus : Kawasan Tanjung Bunga)
	Peneliti	Isfa Sastrawati
3	Latar Belakang	Semakin meningkatnya kegiatan pembangunan dan jumlah penduduk menyebabkan penggunaan lahan di kawasan tepi air iku dimanfaatkan antara lain untuk pusat pengembangan kegiatan industri, pariwisata, komersil, agrobisnis, permukiman, transportasi, dan pelabuhan. Kawasan Tanjung Bunga direncanakan sebagai kota baru yang terletak di sebagian wilayah Kota Makassar dan Kabupaten Gowa (Sulawesi Selatan) yang terletak di tepi pantai dan dibelah oleh Sungai Jeneberang dan Danau Tanjung Bunga. Kota baru ini dikembangkan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan ruang atau lahan baru. Dengan berbagai potensi dan daya tarik alam yang dimiliki, kawasan ini strategis untuk dikembangkan menjadi berbagai fungsi sehingga mampu menarik minat pengembang.

	Metode	Aspek yang dipertimbangkan adalah kondisi yang ingin dicapai dalam penataan kawasan. Komponen penataan merupakan unsur yang diatur dalam prinsip perancangan sesuai dengan spek yang dipertimbangkan. Variabel penataan adalah elemen penataan kawasan yang merupakan bagian dari tiap komponen yang diatur. Aspek yang dipertimbangkan, komponen dan variabel penataan kawasan dihasilkan dari kajian teori (normatif), kebijakan atau aturan dalam penataan kawasan tepi air baik di dalam maupun di luar negeri dan hasil pengamatan di kawasan studi.
	Hasil	Perumusan prinsip perancangan kawasan tepi air dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengembangan kawasan, khususnya pembangunan baru kawasan tepi air, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk dijadikan wacana bagi pembangunan kembali (redevelopment) atau konservasi. Prinsip perancangan yang telah dirumuskan lebih ke arah penataan fisik dan berpihak kepada pemenuhan kebutuhan manusia seperti penataan ruang publik dan jalur pejalan, pandangan yang dikendalikan, serta pemanfaatan potensi dan keunikan kawasan sehingga dapat diwujudkan kawasan yang nyaman untuk dihuni, mempunyai citra sendiri, dan produktif. Prinsip perancangan yang dihasilkan juga memberikan kesempatan berusaha bagi pedagang kaki lima dengan pengaturan dan penyediaan ruang-ruang tertentu di kawasan, tetapi perlu didukung dengan pengawasan yang ketat sehingga tidak menambah masalah kota dan tidak menyebabkan terjadinya konflik kegiatan. Untuk aplikasi di lapangan, perlu kerjasama berbagai pihak dan diperlukan pula sistem kelembagaan yang dapat menjamin diterapkannya prinsip perancangan sehingga tidak hanya mempertimbangkan keefisienan dalam pengembangan kawasan tetapi juga nilai manusia dan lingkungan.

No.	Judul	Pemanfaatan Ruang Kawasan Tepi Pantai Untuk Rekreasi Dalam Mendukung Kota Tanjungpinang Sebagai Waterfront City
4	Peneliti	M. Tahir
	Latar Belakang	<p>Pada saat ini semakin dirasakan bahwa peranan sektor pariwisata dalam menunjang pembangunan nasional terus meningkat. Pariwisata juga merupakan salah satu sektor andalan untuk memperoleh devisa dari penghasilan non-migas. Selain perolehan devisa, pariwisata juga berperan dalam bidang-bidang strategis yang lain, misalnya menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan, mendorong pelestarian lingkungan hidup, mendorong pelestarian dan pengembangan budaya bangsa dan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Sesuai dengan visi dan misi Kota Tanjungpinang yang merupakan kota wisata dengan karakteristik sebagai kawasan tepi pantai yang religius dan didukung oleh sektor perdagangan dan jasa, maka sektor ini perlu mendapatkan perhatian lebih. Selama ini, rekreasi di Kota Tanjungpinang identik dengan wisata budaya yang mengacu pada sejarah religius, terutama mengenai budaya melayu. Selain itu pemerintah provinsi juga mempunyai program mengenai pengembangan rekreasi di kawasan tepi pantai, yaitu dengan membuat one space plaza di sekitar tepi pantai yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana hiburan rakyat. Kawasan ini juga dapat digunakan untuk event lokal Kota Tanjungpinang seperti tempat upacara pada hari-hari tertentu. Di sekitar kawasan ini rencananya juga akan dibangun sebuah menara sebagai landmark kawasan dimana orang-orang bisa naik ke bagian atas menara untuk menikmati pemandangan Kota Tanjungpinang.</p>
	Metode	<p>Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Metode Deskriptif yaitu satu metode penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan informasi tentang keadaan yang sedang berlangsung pada saat itu.</p> <p>Tujuan dari metode ini adalah untuk menggambarkan suatu keadaan yang ada pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab akibat melalui identifikasi dari gejala yang ada dari permasalahan. Metode ini dapat digunakan secara luas sehingga dapat membantu dalam melakukan indentifikasi atas variabel yang ada. Pada metode penelitian ini ada dua kriteria yang dalam suatu sistem pengelompokan untuk menjadikan informasi tersebut cocok dengan yang lainnya.</p>

	Hasil	<ul style="list-style-type: none"> - Keindahan yang dimiliki oleh kawasan tepi pantai Kota Tanjungpinang menjadi alternatif daya tarik fisik rekreasi selain obyek-obyek wisata budaya. - Karakteristik kawasan tepi pantai memiliki keunikan view, landscape dan atraksi. - Kemudahan akses ke kawasan menjadi faktor pendukung pengembangan kawasan rekreasi tepi pantai, terutama kelengkapan sarana transportasi air dan darat. - Intensitas dan rutinitas pemanfaatan kawasan sebagai tempat pelaksanaan event-event lokal dan internasional mendukung pengembangan kawasan rekreasi. - Pertumbuhan aktivitas pendukung (<i>activity support</i>) pada kawasan mendukung pertumbuhan aktivitas rekreasi.
--	--------------	--

No.	Judul	Waterfront Development in Malaysia : Do We Have Sustainable Governance?
5	Peneliti	Azlina Binti MD Yassin, Sandy Bond, John McDonagh
	Latar Belakang	In Malaysia, rivers make a huge contribution of social importance to global transportation; as an element in cultures and traditions, as a source of primary and secondary production, and for biodiversity. At present, many waterfront development projects have been undertaken throughout Malaysia, some have been successful developments while others have not been. In some cases, the implementation of these waterfront projects has been driven more by investment needs rather than for community and environmental needs. The aim of this research is to seek respondents' views about governance for waterfront developments in Malaysia, in terms of their effectiveness for the control of waterfront developments in Malaysia.
	Metode	A qualitative approach was employed in this study. The significance of the qualitative approach, in general, was to explore new phenomena and to understand complexities that focused on the provision of in-depth information. The emphasis of the case study approach in relation to this study was to examine governance in waterfront developments from the waterfront development stakeholder's point of view, as well as to identify the constraints for governing waterfront developments. Multiple case studies were employed in the research. Using multiple case studies in this study provided more confidence in the overall results.

		Selection and investigation of a number of waterfront development projects enhanced the accuracy, validity and reliability of the results by capturing the holistic essence of the subject studied.
	Hasil	It can be concluded that the waterfront development process in Malaysia followed a similar process to other kinds of development. Low levels of cooperation between stakeholders involved in the waterfront development process such as government officers and developer and inefficient communication systems among them, has resulted in unsuccessful waterfront developments. Moreover, low enforcement of existing regulations associated with land and waterfront developments and inadequate regulations specifically designed to control waterfront developments, caused further environmental problems. Thus, to achieve sustainable waterfront developments, sustainable governance was recommended as well as better enforcement of the regulations. For governance to be effective, participation should be inclusive with good communications so as to enhance transparency throughout the process. The attributes for the sustainable governance of waterfronts should be used with modification to suit the conditions in the local environment.

Sumber : Berbagai Sumber